



FAN-IITTS PUBLICATION
Alor, Flores, Lembata, Rote, Sabu, Sumba, Timor

**Journal of
NTT
Studies**

Journal of NTT Studies
1 (2) (2009) 088-094
ISSN: 20856504

Open Access

NTT DAN INTELEKTUAL PUBLIK


Gabriel Faimau

PhD Candidate, Department of Sociology, University of Bristol, UK

Email: gfaimau@googlemail.com

Permanent link of this article: <http://ntt-academia.org/nttstudies/2Faimau2009final.pdf>

The Interdisciplinary Journal of NTT Development Studies - An International Bilingual Journal

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode>) License: 

Pada tahun 2005 dan 2008 Majalah *Prospect* yang cukup berpengaruh di Inggris bekerja sama dengan Majalah *Foreign Policy* membuat jajak pendapat tentang siapa saja intelektual publik yang pemikirannya mempunyai gaung dan pengaruh global dalam berbagai aspek debat publik. Jajak pendapat ini lalu merilis nama 100 intelektual publik yang paling berpengaruh di dunia. Christopher Hitchens yang namanya masuk dalam daftar itu di tahun 2005 dan 2008 menulis sebuah artikel singkat dan menarik dalam *Prospect Magazine* 24 Mei 2008 mengkritisi penggunaan dan juga penyalahgunaan istilah ‘intelektual publik’.¹ Di dalam artikel itu Hitchens meruntut sejumlah pandangan umum tentang siapa itu intelektual publik mulai dari pandangan bahwa intelektual publik adalah seseorang yang mencari makan minum atau mendukung hidupnya dengan terlibat aktif dalam ‘perang ide’, sampai pada keyakinan klise bahwa intelektual publik adalah seseorang yang berdiri tegak memperjuangkan kebenaran di hadapan penguasa dan kekuasaan (meskipun Noam Chomsky sendiri pernah mengingatkan bahwa penguasa dan kekuasaan juga tahu dengan baik apa itu kebenaran). Lepas dari berbagai definisi itu, Hitchens menunjuk sesuatu yang sangat vital. Baginya, menjadi intelektual publik lebih berhubungan dengan siapakah seseorang daripada apa yang dia buat. Paparan ini tampak sangat filosofis tetapi arusnya bermuara pada pemikiran bahwa intelektual publik adalah mereka yang menuangkan dan meneruskan gagasan mereka kepada dunia luas tetapi juga menemukan jalan agar gagasan itu bisa diwujudkan nyatakan (‘men of thought who are also men of action’).

Hubungan kaum intelektual dan perubahan masyarakat sudah banyak dibahas. Untuk 200 tahun terakhir, sebut saja gagasan para pemikir mulai dari Ralph Waldo Emerson yang melihat kaum intelektual sebagai seorang utuh, sempurna dan lengkap dengan berbagai potensi; atau Antonio Gramsci dengan paparannya tentang intelektual tradisional dan organik; sampai dengan Edward W. Said yang memberi nada dan

¹ Hitchens, C. (2008), “How to be a public intellectual”, dalam *Prospect Magazine*, Issue 146, 24 Mei 2008.

'staccato' politis pada pandangannya tentang intelektual publik sebagai kaum yang mengemban misi untuk memajukan kebebasan manusia dan mendobrak *status quo* dengan pengetahuan yang memerdekakan dari kesesatan berpikir. Dari berbagai pemikiran tercecer, dapat dikatakan intelektual publik 'dipanggil' untuk melibatkan diri dalam hidup dan perubahan masyarakat sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar telaah intelektual. Mungkin karena itulah kerap intelektual publik bisa dicerna sebagai kaum elitis karena bermain-main di menara gading 'gagasan yang tak mendarat' atau juga kaum populis kiri karena berpihak pada masyarakat umum di hadapan *status quo* kekuasaan. Apa kiranya relevansi bahasan tentang intelektual publik untuk konteks Nusa Tenggara Timur? Saya coba memanfaatkan ruang ini untuk secara umum mendekati pertanyaan ini dengan dua argumen sederhana: kreativitas intelektual publik kita tergantung pada peran sosial yang 'diberikan' masyarakat dan kemajuan sebuah masyarakat ditentukan pula oleh kapasitas publik kaum intelektualnya.

Dilema Kaum intelektual dan Keterlibatan Sosial

Ada satu insiden menarik selama masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) Indonesia 2009. Seperti diberitakan media massa tanah air di awal Juli 2009, dalam satu kesempatan kampanye pilpres, Andi Mallarangeng, anggota tim kampanye pasangan SBY-Boediono dalam salah satu pidatonya kala itu berujar, "Belum saatnya orang Sulsel [Sulawesi Selatan] memimpin Indonesia." Pernyataan ini menuai tanggapan kritis berbagai pihak. Di pentas nasional, Forum Rektor Indonesia Simpul Sulawesi Selatan (FRIS-Sulsel) menuduh pernyataan Andi Mallarangeng sangat bertentangan dengan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan konteks kemajemukan tanah air. Dalam situasi tanggap-menanggapi ini, Rizal Mallarangeng pun tampil mengkritisi suara FRIS-Sulsel. Media massa mengutip kritik tajam Rizal bahwa tugas rektor bukanlah untuk memberikan pernyataan politik atau terlibat dalam forum yang bersifat praktis tetapi lebih ke hal-hal yang akademik saja.

Pemisahan yang dibuat Rizal Mallarangeng memetakan dua dunia yakni dunia pemikiran (intelektual) dan dunia politik praktis seolah keduanya adalah dunia terpisah. Pemetaan seperti ini mengingatkan akan pemetaan yang sama dalam 'debat' yang diprakarsai juga Rizal Mallarangeng di tahun 1996 lewat salah satu tulisannya berjudul 'Arief Budiman'.² Dalam tulisan ini, Rizal coba mengamati dilemma besar yang kerap dihadapi ilmuwan yang aktivis atau aktivis yang ilmuwan. Dilema ini, setidaknya menurut Rizal, terletak pada perbedaan mendasar antara ilmuwan yang bergerak dalam ranah ide dan aktivis yang bermain dengan realitas sosial di lapangan nyata. Dalam tataran pencarian, ilmuwan dan aktivis mendekati kebenaran dengan pendekatan berbeda. Seorang ilmuwan mencari, meragukan, mempertanyakan dan menguji kebenaran. Kalau suatu saat sebuah ide yang diikuti dipertanyakan kebenarannya atau terbukti salah, ilmuwan bisa mengubah posisi dan mengikuti penemuan baru yang lebih meyakinkan. Ini berbeda dengan aktivis yang tampil sebagai pemegang kebenaran di hadapan para pengikutnya atau kelompoknya. Karena fungsi ini aktivis haruslah bukan orang yang ragu-ragu tetapi memegang kebenaran yang pasti karena keragu-ruguan hanyalah sebuah tanda ketakutan. Malapetaka besar menimpa seorang aktivis ketika kebenaran pasti yang selalu dipegang ternyata tidak berkesinambungan dengan realitas di lapangan, keliru atau bahkan salah. Singkatnya, ilmuwan dan aktivis bergerak di dunia yang berbeda.

² Lihat Mallarangeng, R., "Arief Budiman", dalam *Gatra*, 17 Agustus 1996.

Pemetaan itu kemudian ditanggapi oleh Arief Budiman dan ditanggapi lagi oleh Rizal Mallarangeng dengan sejumlah debat teoritis atas dilemma ini.³ Saya tidak akan memasuki diskusi dilemma teoritis ini, karena yang ingin ditunjukkan di sini adalah bagaimana ketegangan antara dunia hidup kaum intelektual dan keterlibatannya pada tataran hidup sosial praktis sudah menjadi sebuah ‘tema tradisional’ dalam berbagai diskusi. Tema ini juga muncul dalam debat seputar sosiologi publik dan intelektual publik yang diprakarsai *The British Journal of Sociology* dan LSE di London tahun 2005. Dalam debat ini, makalah utama dibawakan oleh Prof Bryan S. Turner.⁴ Sambil menelusuri kenyataan historis sosiologi Inggris dan kemungkinan alternatif lain untuk sosiologi publik, Prof Turner mengajukan argumen penting tentang keterlibatan intelektual publik dalam membangun perspektif kritis untuk hidup dan tata kelola masyarakat. Beberapa hal pun ikut diamati. Bagi Prof Turner, kurangnya intelektual publik terjadi karena kurangnya budaya publik yang kritis. Itu berarti, kekurangan intelektual publik terjadi bukan karena kegagalan psikologis atau kemauan dan tanggung jawab. Sebaliknya, kekurangan ini terjadi karena ruang sosial tidak tersedia dan lebih dari itu tak ada peran sosial yang diberikan masyarakat kepada kaum intelektual. Itulah sebabnya, sering mereka ini menjadi ‘orang luar yang terasing’ gara-gara intelektual publik telanjur diasosiasikan dengan perjuangan politis. Semakin terbuka ruang untuk peran sosial dan ekspresi panggilan moral intelektual publik, pembaharuan dan perubahan menjadi lebih mungkin.

Panggilan Intelektual Publik

Di samping ruang untuk peran sosial intelektual publik, kapasitas kaum intelektual seperti tampak dalam fungsi sosial mereka ikut menentukan denyut nadi maju mundurnya masyarakat tertentu. Fungsi sosial atau panggilan moral intelektual publik setidaknya bisa dikelompokkan dalam tiga kategori yang saling berhubungan: intelektual publik yang berkomitmen atau berserah diri, intelektual publik yang berpihak pada kepentingan anggota masyarakat dan intelektual publik sebagai mediator atau penengah.⁵ Pertama, intelektual publik yang berkomitmen. Ide intelektual publik yang memiliki komitmen biasanya dihubungkan dengan komitmen untuk mempertanyakan, mengkritisi dan menantang praktek-praktek ketidakadilan. Menurut filsuf Perancis Jean Paul Sartre, tugas seorang intelektual adalah mengkritisi dan menolak segala bentuk ketidakadilan.⁶ Atau dalam bahasa Edward W. Said, intelektual publik yang berkomitmen memiliki panggilan untuk menyuarakan kebenaran di hadapan penyalahgunaan kekuasaan. Walaupun ungkapan Said bisa dianggap klise seperti diutarakan Christopher Hitchens, frase abstrak itu bisa memuat di dalamnya hal penting bahwa intelektual publik adalah agen keadilan. Keadilan biasanya dipahami

³ Lihat tanggapan Arief Budiman, “Ilmuwan dan Aktivistis”, *Harian Kompas*, 27 Agustus 1996. Tanggapan balik Rizal Mallarangeng dapat dilihat dalam “Ilmuwan dan Aktivistis”, dalam *Gatra*, 30 November 1996

⁴ Turner, B.S. (2006), “British sociology and public intellectuals: customer society and imperial decline”, dalam *The British Journal of Sociology*, Vol. 57(2): 169-188. Lihat juga tanggapan balik Prof Turner atas para pengkritiknya, “Public intellectuals, globalization and the sociological calling: a reply to critics”, dalam *The British Journal of Sociology*, Vol. 57(3): 345-351.

⁵ Nasar Meer menggunakan istilah ‘committed intellectuals’, ‘intervening intellectuals’ dan ‘mediating intellectuals’. Lihat Meer, N. (2006), “Get off your knees’: Print Media Public Intellectuals and Muslims in Britain”, dalam *Journalism Studies*, Vol. 7(1): 35-59.

⁶ Sartre, J.P. (1974), *The Writings of Jean-Paul Sartre*, dalam M.Contat dan M. Rybalka (Eds), Evanston: Northwestern University Press.

dalam arti distribusi sumber daya dan kekayaan secara merata. Tetapi dalam hubungan dengan fungsi sosial intelektual publik, distribusi keadilan bisa kita pahami lebih luas untuk merangkum juga hubungan antara 'ide dan tindakan'.⁷ Artinya, intelektual publik yang berkomitmen tidak hanya melahirkan gagasan tetapi membuka juga ruang agar 'kata menjadi aksi'.

Kedua, intelektual publik yang berpihak. Bagi Michel Foucault, komitmen intelektual publik untuk mempertanyakan ketidakadilan dan menyuarakan yang benar saja sebetulnya tidak cukup. Intelektual publik mesti mengambil langkah lanjut dengan berpihak pada korban ketidakadilan dan memainkan peran sebagai suara dari yang tak bersuara serta harapan dari yang tak memiliki harapan di hadapan kekuasaan yang mengungkung.⁸ Intelektual publik karena itu memiliki peran khusus untuk melakukan intervensi bukan saja ketika kekuasaan disalahgunakan tetapi melanjutkan intervensi itu dengan pilihan jelas yakni keberpihakan pada yang menderita dan menjadi korban. Ide yang sama dikemukakan juga oleh Edward W. Said dalam diskusinya seputar wacana dan kekuasaan. Bagi Said, intelektual publik ada bukan untuk dirinya sendiri. Dia menulis dan berbicara atas nama suara publik khususnya mereka yang menderita. Dalam salah satu wawancaranya dengan Christopher Lydon di tahun 2000, ia tidak ragu mengakui bahwa dirinya adalah seorang intelektual militan: "...my tongue is very sharp...I give and trade blows with people...who disagree with me, I mean that's part of the deal".⁹ Kata-kata Said tidaklah berlebihan melihat keberpihakannya yang tegas atas hak-hak orang Palestina di satu pihak dan kritiknya yang tajam atas berbagai bentuk anti-Semitisme di pihak lain.

Ketiga, intelektual publik sebagai mediator atau penengah. Thomas Osborne dan Gregor McLennan, dua guru besar di Universitas Bristol di Inggris, adalah dua pemikir yang membahas fungsi ini dalam beberapa tahun terakhir terutama sejak gagasan 'The Third Way' diluncurkan Anthony Giddens.¹⁰ Bagi Osborne dan McLennan, kita tidak lagi hidup dalam sebuah dunia yang dikendali oleh ide yang tampak jelas di depan mata atau yang masih merupakan teka-teki misterius. Kita sebenarnya ada dalam sebuah dunia di mana ide tampak bergerak seperti layaknya sebuah kendaraan. Dalam dunia seperti ini, pesan, berbagai gambar dan konsep 'mengangkut' kita hanya untuk jarak tertentu dari A ke B untuk tujuan tertentu. Itulah sebabnya ada begitu banyak 'isme' atau aliran pemikiran yang tumpang tindih seperti multikulturalisme dan kosmopolitanisme. Di satu pihak, aliran pemikiran ini mempunyai kekuatan untuk menggerakkan dan merangsang nalar tetapi di lain pihak sangat sulit untuk kita telaah nilai analitis dan normatif yang menjadi sendi bangunan aliran-aliran pemikiran ini. Dalam konteks ini, intelektual publik memainkan peran dalam memilah secara kritis konsep tepat yang bisa dipakai untuk bangunan sosial masyarakat, termasuk fungsi kritis atas hukum dan

⁷ Fuller, S. (2006), "The Public Intellectual as Agent of Justice: In Search for a Regime", dalam *Philosophy and Rhetoric*, Vol. 39(2): 147-156.

⁸ Foucault, M. (1977), *Language, Counter-memory, Practice*, Ithaca: Cornell University Press.

⁹ Singh, A. & Johnson, B.G. eds. (2004), *Interviews with Edward W. Said*, Mississippi: The University Press of Mississippi, hal. xiii.

¹⁰ Lihat misalnya McLennan, G. & Osborne, T. (2004) "Contemporary 'vehicularity' and 'romanticism': debating the status of ideas and intellectuals", dalam *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, Vol. 6(4): 51-66; Osborne, T. (2004), "On Mediators: intellectuals and the ideas trade in the knowledge society", *Economy and Society*, Vol. 33(4): 430-447; McLennan, G. (2004), "Travelling with vehicular ideas: the case of the Third Way", dalam *Economy and Society*, Vol. 33(4): 484-499.

penataan serta pelaksanaannya. Ini menghantar kita pada konsep ‘legislator’ dan ‘interpreter’ yang dibahas Zygmunt Bauman dalam *Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals*.¹¹ Dalam peran ‘legislator’, intelektual publik mengamati secara kritis alasan dan rasionalisasi hukum dan sistem perundangan yang mengatur hidup masyarakat. Peran ini tidak berhenti di sini. Intelektual publik juga memainkan peran sebagai ‘interpreter’ yakni penafsir sistem ini dan menghantarnya ke masyarakat luas dalam bahasa yang bisa dipahami publik. Singkatnya intelektual publik adalah mediator antara sistem dan anggota masyarakat.

Memperhatikan fungsi-fungsi seperti telah dipaparkan, kiprah intelektual publik berhubungan sangat erat dengan ide *civil society* yang sehat. Konsep *civil society* telah lama dipaparkan para pemikir dan filsuf sejak abad ke-18. Konsep ini laris didiskusikan lagi dalam tiga dekade terakhir termasuk di tanah air. Meskipun terdapat banyak perbedaan, konsep-konsep *civil society* intinya menerangkan hal yang sama yakni persoalan seputar ruang privat dan ruang publik, hidup individual dan hidup sosial, kepentingan pribadi dan etika publik, urusan pribadi dan kehendak publik.¹² Untuk sederhananya dan dalam konteks paparan tulisan ini, arena *civil society* yang dipaparkan G.W.F. Hegel bisa dipertimbangkan di sini.¹³ Bagi Hegel, *civil society* mengambil tempat antara keluarga dan negara. Bila keluarga menempati ruang privat dan wilayah negara meliputi ruang politik, maka *civil society* menempati ruang publik. Ruang publik yang merupakan wilayah *civil society* ini ditopang oleh ide tukar menukar pikiran guna menemukan jalan bersama untuk mencapai kehendak dan kepentingan kolektif melalui komunikasi aktif dan transparan dari semua aktor yang terlibat dalam seluruh proses berbagi ide dan pendapat.¹⁴ Itu berarti *civil society* yang sehat di satu pihak kritis terhadap kekerasan negara dan penyangkalan/pelecehan hak-hak individual dan di pihak lain menantang dan melawan tirani berpikir yang dibangun atas dasar-dasar primordial seperti urusan atau hubungan keluarga, suku, agama atau golongan. *Civil society* yang sehat menjadi lebih mungkin bukan saja ketika ruang publik terbuka bagi intelektual publik tetapi ketika intelektual publik mengambil peran sebagai pengemudi *civil society* lewat komunikasi aktif para anggotanya dalam ruang publik.

Intelektual Publik untuk Konteks NTT

Tentang visi ‘Another NTT is possible’, oleh salah satu penggagas Forum Academia NTT menyatakan bahwa langkah penting pertama menuju visi itu adalah menyatukan kaum *academia* dan intelektual Nusa Tenggara Timur (NTT). “Bila *social capital* ini diabaikan, maka NTT sebagai Indonesia Tenggara Timur akan tetap tertinggal di abad 21.”¹⁵ Terobosan persuasif ini menempatkan kaum intelektual pada posisi begitu penting untuk sebuah visi besar. Itu berarti kapasitas kaum intelektual dan peran

¹¹ Bauman, Z. (1987), *Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals*, Cambridge: Polity.

¹² Selligman, A. (1992), *The Idea of Civil Society*, New York: The Free Press, hal. 5.

¹³ Hegel, G.W.F. (1995), *Lectures on Natural Right and Political Science: The First Philosophy of Right*, diterjemahkan dari bahasa Jerman oleh J.M. Stewart & P.C. Hodgson, London: University of California Press, khususnya bagian III.

¹⁴ Salvatore, A. (2007), *The Public Sphere: Liberal Modernity, Catholicism, Islam*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, hal. 7.

¹⁵ Lassa, J. (2007), “Another NTT is Possible: Urgensitas Konvergensi Academia NTT”, *Pos Kupang*, 10 Desember 2007, p. 14.

intelektual publik di NTT ikut menentukan kemajuan masyarakat wilayah itu. Mengikuti paparan singkat tentang fungsi intelektual publik, ide Lassa (2007) tampak sangat beralasan. Terobosan pembentukan *Forum Academia NTT*, perintisan *Journal of NTT Studies* dan berbagai bentuk diskusi ‘online’ dan ‘offline’ dalam forum ini merupakan salah satu langkah yang memberi cukup harapan.

Jauh sebelum adanya forum ini, sejumlah intelektual publik dari dan di NTT sudah lama berkiprah dengan pengaruh luas baik di tingkat lokal maupun nasional dan internasional. Beberapa bisa disebutkan di sini.¹⁶ Dalam wilayah politik kita mengenal Frans Seda, Prof Herman Yohanes, Sony Keraf; dalam dunia sastra terdapat nama besar seperti Gerson Poyk, Julius R. Siyaranamual dan Umbu Landu Peranggi; dunia akademis dan penelitian dengan berbagai basis mencatat nama-nama antara lain Ignas Kleden, Andres Yewangoe, Daniel Dhakidae, Thoby Mutis, Vincent Gaspersz, Tom Therik, Herman Embuiru; dan praktisi seperti John Campbell Nelson, Lerry Mboeik, Pius Rengka, Jacob Frans. Di samping itu, berbagai institusi di NTT telah memainkan peran sangat vital dalam sejarah intelektual publik NTT. Sebut saja kampus-kampus penting di NTT seperti Universitas Nusa Cendana (UNDANA), STFK Ledalero, UNIKA Widya Mandira dan UNKRIS. Terdapat juga pusat penelitian seperti *Candraditya* di Flores. Patut dicatat pula bahwa berkembangnya dunia media di NTT dalam dua dekade terakhir dengan adanya berbagai media cetak seperti *Pos Kupang*, *Timor Express*, *Flores Pos* dan berbagai media elektronik membuka lebar tirai ruang publik NTT. Terobosan teknologi komunikasi dan Internet pun sudah mencapai berbagai pelosok daerah ini. Hadirnya berbagai LSM, forum dan asosiasi masyarakat di NTT serta jaringan yang ada di antara lembaga dan forum-forum yang oleh sejumlah pemikir dilihat sebagai bagian penting *civil society* ini ikut menentukan kuatnya peran intelektual publik dalam hubungan dengan perubahan masyarakat. Singkatnya, ‘another NTT’ bukanlah suatu fantasi belaka, ilusi atau mimpi di siang bolong.

Untuk berlanjutnya fokus visi ‘another NTT’ ini, ada tiga pengamatan sangat umum yang ingin saya kemukakan di bagian terakhir tulisan singkat ini. Yang pertama berhubungan dengan jaringan kekuasaan saat ini di NTT. Menurut salah satu pelopor teori jaringan kekuasaan, G. William Domhoff, kekuasaan yang berakar dalam organisasi apa saja termasuk kelola masyarakat pada dasarnya ditentukan oleh empat jaringan yakni ideologis, ekonomis, militer dan politik.¹⁷ Saya agak membuat generalisasi di sini. Hemat saya, dalam konteks NTT ada dua jaringan yang memiliki kekuatan besar yakni kekuatan ideologis dan kekuatan politis. Meskipun kata ideologis masih bisa dikritisi, untuk kepentingan paparan ini, kekuatan ideologis diwakili oleh kekuatan agama atau kepercayaan dan budaya. Sedangkan kekuatan politis diwakili oleh pemerintahan dan penguasa politis. Tampilnya dua kekuatan besar ini kerap membuat hubungan saling memanfaatkan (kadang dalam arti negatif) tak begitu mudah dikontrol. Sebagai contoh saja, ketika sebuah kerusuhan terjadi misalnya, para penguasa

¹⁶ Setiap kategori selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya tidak bermaksud untuk membuat daftar akurat tentang intelektual publik NTT dengan kategori bidang-bidang khusus. Seorang sastrawan/wati misalnya berkarya di dunia sastra tetapi bisa memiliki pengaruh politis sehingga secara kategorial bisa digolongkan dalam dunia politik atau praktisi. Yang dipaparkan di sini, hanya contoh sejumlah nama intelektual publik NTT. Ke depan, sebuah studi mendalam tentang periodisasi dan khazanah intelektual publik NTT tentu akan sangat membantu. Studi dimaksud bisa dibarengi dengan studi tentang formasi jaringan intelektual publik NTT sebagai sebuah kelompok strategis.

¹⁷ Bahasan tentang ‘The Four Networks Theory of Power’ oleh G. William Domhoff tersedia online di: http://sociology.ucsc.edu/whorulesamerica/power/bohemian_grove.html. (diakses 26 Juli 2009).

politis akan meminta para pemimpin agama untuk menenangkan ‘umat’ dan para penganut agama. Dalam arti tertentu, para pemimpin agama dilibatkan lewat permintaan dan himbauan untuk ‘urusan keamanan bersama’. Tetapi ketika ada para pemimpin agama mengkritisi rancangan kebijakan atau keputusan politis tertentu, penguasa politis akan segera dengan mudah mengatakan, “Politik bukanlah bidangmu karena urusanmu adalah urusan agama”. Fungsi kontrol atas kedua jaringan ini dan juga dua jaringan lain tentu saja mengandaikan sebuah *civil society* kuat. Di sinilah dan ke depan intelektual publik (NTT) mendapat peran sosial dan peran moral yang sangat besar.

Kedua, dalam konteks NTT perbedaan kerap menjadi sarana dan tameng politis khususnya perbedaan agama (secara khusus Katolik dan Protestan) dan suku. Tahun 2008, saya berlibur ke Timor persis saat pemilihan Kepala Daerah Tingkat I NTT. Sangat mengagetkan ketika di terminal bis pun orang bertanya dan berdiskusi tentang agama calon tertentu. Sah-sah saja diskusi seperti itu tetapi diskusi tentang agama seorang calon ini menjadi begitu dominan sampai kualitas seorang calon tidaklah lagi menjadi bahan pertimbangan. Lebih dari itu, kadang alur pikir politis yang bersandar pada dinding perbedaan agama dan suku merepotkan paling tidak secara kategoris. Pengalaman yang sama saya temukan pada masa pemilihan mantan Gubernur Piet Alexander Tallo SH. Seperti biasa, bisik-bisik politis saat itu diramu dengan bumbu ‘orang kita’ versus ‘orang mereka’. Sejumlah orang Katolik di Timor malah repot ketika berhadapan dengan dilema bahwa Bapak Piet A. Tallo menganut Protestan tetapi dia juga orang Timor atau beliau orang Timor tetapi juga Protestan. Intelektual publik NTT berperan mencairkan kebekuan politik dan menantang pola pikir politis yang sadar atau tidak sadar masih dikendali oleh ‘narsisisme perbedaan-perbedaan kecil’ sebagaimana dibahas Sigmud Freud.¹⁸ Meskipun tampak sensitif, menghantar persoalan ini ke ruang publik justru lebih produktif daripada bisik-bisik politis di belakang layar. Untuk ‘Another NTT is possible’ kita boleh bermimpi bahwa suatu saat “orang dinilai bukan dari warna kulit tetapi isi karakternya” (Martin Luther King).

Ketiga, Internet kini membuat ‘distribusi’ pengetahuan menjadi mungkin, merata dan ‘adil’. Atau seperti dikatakan Singh Vaidhyathan, belum pernah sebelumnya terdapat saat yang lebih bagus untuk menjadi seorang intelektual publik, dan Internet adalah alasan besar mengapa kini adalah saat yang paling tepat untuk menjadi intelektual publik.¹⁹ Kehadiran internet tidak hanya memperlancar hubungan sosial tetapi juga membaharui dan bahkan mengubah pola hubungan itu. Peluncuran dan penanganan secara profesional berbagai ‘websites’ di dan tentang NTT di berbagai sektor termasuk kampus-kampus di NTT tidak saja akan memperkenalkan wilayah ini ke lingkup lebih luas tetapi menghantar kualitas daerah ini termasuk kualitas intelektualnya ke pentas diskusi, percakapan dan debat publik. Kelola ‘bank database’ atau ‘perpustakaan online’ penelitian dan publikasi tentang NTT kini lebih mungkin. Pemanfaatan ‘berkat’ Internet ini bukan tidak mungkin menyediakan platform yang bagus untuk lahirnya intelektual-intelektual publik NTT.****

¹⁸ Freud, S. (2002), *Civilizations and Its Discontents*, London: Penguin. Untuk konteks NTT (dan Indonesia), lihat juga paparan Dominggus Elcid Li, “Hari sudah pagi”, *Pos Kupang*, 14 Agustus 2009.

¹⁹ Vaidhyathan, S. (2006), “The Lessons of Juan Cole,” dalam *Chronicle of Higher Education*, July 28, 2006.